

RENJA

*RENCANA KERJA
TAHUN 2022*



*DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BONE*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2022. Rancangan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2022. disusun dengan diawali penjangkaran aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan rencana kerja (RENJA) Pemerintah Daerah. Rancangan rencana kerja tersebut sebagai acuan dan pedoman bagi Badan atau Dinas atau Kantor atau Perangkat kerja dilingkungan Kabupaten Bone dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah Tahun 2022..

Buku Rancangan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2022. ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022..

Watampone, 08 Juli 2021

**Kepala Dinas Koperasi, UKM
Kabupaten Bone**



Ir. WAHIDAH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19681130 1994032007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3. Maksud danTujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

OPD..... 6

Analisa Kinerja Pelayanan OPD 14

Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD..... 24

Review Terhadap RKPD 27

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD 36

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 36

Tujuan dan sasaran Renja OPD 39

3.3 Program Dan Kegiatan41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD 43

BAB V PENUTUP 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD 7

Tabel 2.2.Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian
Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 8

Tabel 2.4.Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD 23

Tabel 2.5.Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020..... 27

Tabel 2.6.Tabel Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

Tabel 3.1.Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi 36

Tabel 3.2.Identifikasi Kebijakan Dalam RPJMD..... 37

Tabel 3.3 Tujuan dan SasaranTahun 2022..... 39

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
BoneTahun 2022..... 44

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD serta Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran biaya, satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk Tahun n dan Tahun $n+1$. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan RAPBD.

Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone 2022. Proses penyusunan Renja sesuai dengan bahan musrenbang RKPD Kabupaten Bone tahun 2022 yang akan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2018-2023 sehingga akan memudahkan didalam mengukur target kinerja tahunan.

Landasan Hukum

Landasan idil dari Rencana Kerja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Bone diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bone.
15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Bone Nomor: 77 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.

17. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018.
18. Peraturan Bupati Bone Tanggal Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018.
19. Surat Edaran Bupati Bone Tanggal 12 Maret Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
20. Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3).
21. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
23. Peraturan Bupati Bone Kabupaten Bone Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone untuk satu tahun mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan Renja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk perencanaan pengembangan, penumbuhan dan peningkatan dibidang koperasi dan usaha mikro melalui arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama satu tahun serta mengukur kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung Pembangunan Daerah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2022 ini juga terdapat informasi-informasi yang memudahkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan pengukuran dan

penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone adalah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra PD, terdiri dari 5 BAB dan beberapa lampiran disusun dengan sistematika sebagai berikut :

” SISTEMATIKA PENULISAN ”

BAB I Pendahuluan berisi : 1.1) Latar Belakang, berisi tentang : 1.2) Dasar Hukum Penyusunan, 1.3) Maksud dan Tujuan, 1.4) Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Bab ini memuat tentang 2.1) Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja PD Tahun-Tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan, 2.2) Analisis Kinerja Pelayanan PD, 2.3) Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, 2.4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan, 2.5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN berisi tentang : 3.1) Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi yaitu Penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD, 3.2) Tujuan dan Sasaran Renja PD yaitu Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra PD. 3.3) Program dan Kegiatan,

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu (n-2) dan (n-1) serta Capaian Renstra PD

Perihal Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu masih melekat pada satuan Dinas Koperasi, dan UKM Kabupaten Bone sebelum adanya dinas tahun berjalan saat ini yaitu satuan dinas baru Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Diskop dan UKM Tahun 2020 terfokus hanya pada Bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2018-2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro melaksanakan program dan kegiatannya.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro Kabupaten Bone dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan / kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data Evaluasi Renja (Lampiran).

C. Evaluasi Program Tahun 2020

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bone dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.815.000.000 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 341.652.142- atau 90%. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
Dan Capaian Renstra PD

No	Program dan Kegiatan	RENCANA (Rp.) 3	REALISASI (Rp.) 4	% DANA 5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	432.024.200,-	483.147.647,-	94%
	Jasa Administrasi Komunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik	94.385.000	84.998.631	90%
	Jasa Administrasi Keuangan	76.659.200	68.359.200	89,17%
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.000.000	8.000.000	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	8.750.000	87,50%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	242.980.000	242.933.900	99,98%
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	71,524.500	70.105.916	98,02%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	181.627.400,-	178.985.055,-	98%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	44.998.900	44.998.900	100,00%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	19.625.000	19.625.000	100,00%
	Pengadaan Mebeleur	17.000.000	17.000.000	100,00%
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	18.053.500	16.233.500	89,92%
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	81.950.000	81.127.655	99,00%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.000.000,-	58.000.000,-	64,44%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Prundang-Undangan	90.000.000	58.000.000	64,44%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja	34.500.000,-	34.300.000,-	99,42%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.500.000	34.300.000	99,42%
5.	Program Penunjang Pemerintahan Umum	49.500.000,-	49.100.000,-	50%
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	31.000.000	30.800.000	0,99%
	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	18.500.000	18.300.000	98,92%
6.	Program Pngembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	46.935.900,-	46.435.000,-	98,93%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	46.935.900	46.435.000	98,93%
7.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	318.750.000,-	300.577.200,-	94%
	Pemantauan Pengelolaan Pelatihan Kewirausahaan	43.600.000	43.520.000	100%
	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	133.650.000	128.482.200	96,14%
	Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	60.600.000	47.680.000	78,68%
	Pendataan UMKM	80.900.000	80.895000	100,00%
8.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	725.138.000,-	721.541.900,-	100,00%
	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	112.670.000	112.670.000	100,00%
	Kegiatan Sosilaisasi Prinsip Pemahaman Perkoperasian	68.480.000	68.480.000	100,00%
	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi	122.870.000	120.460.000	100,00%
	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi	35.998.000	35.998.000	100,00%
	Monitiring, Evaluasi dan Pelaporan	40.000.000	40.000.000	100,00%

Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus Pengelola USP/KSP	54.804.000	54.804.000	100,00%
Pembinaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	42.250.000	42.200.000	100,00%
Pembinaan dan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP	143.800.000	143.633.900	100,00%
Pembinaan dan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelola Pasar Tradisional	29.800.000	28.850.000	100,00%
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	74.466.000	74.446.000	100,00%
JUMLAH			
	1.878.475.500,-	1.872.086.802,-	96,20%

Demikian Review evaluasi pelaksanaan program kegiatan di tahun 2020 adalah tercapai baik dengan capaian 96,20%. Mendukung Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran program kegiatan yang lebih matang berdasar evaluasi tahun sebelumnya perlu di ambil kebijakan lanjutan dalam memaksimalkan target program kegiatan pelaksanaan.

Langkah Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah :

- Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra PD.
- Merencanakan target fisik dan keuangan maksimal sebanyak pada Tahun sebelumnya.

Tabel 2.2 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone

lembar.....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Wajib									
1	15			Bidang Koperasi dan UKM									
1	15	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun anggaran	683,000,000	468,548,700	435,359,200	429,909,800	94,36	542,728,300	511,035,883,33	10,83
1	15	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet).	105,000,000	82,385,000	68,000,000	88,000,000	87,85	105,000,000	57,063,783,333	69,26
1	15	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali).	171,000,000	76,659,200	96,859,200	99,076,800	92,20	106,276,800	347,486,433	45,3
1	15	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Jumlah pemenuhan dan jasa dan komponen AC,Komputer dan printer (paket).	9,000,000	8,000,000	8,500,000	3,000,000	63,13	9,000,000	4,137,100	51,71

1	15	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan (kali).	12,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000	84,26	12,000,000	6,940,000	69,4
1	15	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Tingkat keikutsertaan Aparat dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi (kegiatan)	288,000,000	219,980,000	180,000,000	3147,833,000	99,36	210,000,000	247,925,433	11,27
1	15	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan ATK, barang cetakan dan penggandaan serta makan dan minum harian/tamu (paket).	98,000,000	71,524,500	72,000,000	84,000,000	89,11	100,451,500	75,423,233	10,54
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran.	168,500,000	221,627,400	107,243,500	78,075,900	96,61	159,293,500	364,246,783	16,43
1	15	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket).	5,500,000	44,998,900	6,000,000	-	-	10,000,000	57,166,300	12,70
1	15	02	07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket).	10,000,000	19,625,000	2,000,000	27,000,000	100.00	27,500,000	49,041,66	24,98
1	15	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket)	8,500,000	17,000,000	7,000,000	-	100.00	7,500,000	59,883,33	35,22
1	15	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor (kegiatan)	60,500,000	58,053,500	10,293,500	10,293,500	98,36	30,293,500	136,778,73	23,56

1	15	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (paket).	84,000,000	81,950,000	81,950,000	40,782,400	83,04	84,000,000	61,376,75	7,48
1	15	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ketersediaan aparat Pembina koperasi yang bersertifikat	93,000,000	90,000,000	98,000,000	22,550,000	87,61	90,300,000	97,169,000	107,96
1	15	05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan bimtek dan diklat structural (orang).	93,000,000	90,000,000	98,000,000	22,550,000	87,61	90,300,000	97,169,000	107,96
1	15	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran.	39,000,000	34,500,000	33,500,000	45,767,000	94,5	37,200,000	34,743,333	100,70
1	15	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (dokumen).	39,000,000	34,500,000	33,500,000	45,767,000	94,5	37,200,000	34,743,333	100,70
1	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase peningkatan kualitas pelaku usaha mikro	75,000,000	147,435,900	41,500,000	45,865,000	-	368,418,945	49,145,300	33,33
1	15	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UM yang dilatih dan difasilitasi bantuan alat usaha (UM)	75,000,000	147,435,900	41,500,000	45,865,000	-	368,418,945	49,145,300	33,33
1	15	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan pelaksanaan pengembangan usaha bagi usaha mikro	413,000,000	318,250,000	297,550,000	150,852,000	97,89	422,677,200	533,584,985	167,66

1	15	17	05	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah WUB yang dibina (WUB).	53,000,000	43,600,000	27,500,000	24,500,000	98,28	64,500,000	47,606,666	109,18
1	15	17	09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi promosi (UKM).	200,000,000	133,150,000	153,500,000	60,525,000	98,80	191,150,000	194,278,233	145,90
1	15	17	10	Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi lokal	Jumlah keluarga miskin usia produktif yang difasilitasi pelatihan kewirausahaan (orang)	70,000,000	60,600,000	44,650,000	-	85,08	88,217,200	82,526,070	25.38
1	15	17	13	Pendataan UMKM	Jumlah data usaha mikro pertahun (UM).	90,000,000	80,900,000	71,900,000	65,800,000	99.62	78,800,000	65,431,667	136,181
1	15	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan pelaksanaan program peningkatan kulaitas kelembagaan koperasi selama satu tahun anggaran	851,500,000	720,138,000	556,597,300	330,007,300	90,78	697,222,055	932,444,066	129,48
1	15	18	01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program PembangunanKoperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi penyuluhan dan mendapatkan legalitas lembaga (peserta)	160,000,000	112,670,000	93,000,000	62,350,000	99,89	114,650,000	153,266,000	136,03
01	15	18	04	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah SDM Pengurus/pengawas koperasi yang mengikuti sosialisasi (orang).	70,500,000	68,480,000	52,250,000	31,490,000	98,66	58,845,000	73,164,800	106,84
1	15	18	05	Pembinaan Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi berprestasi yang difasilitasi pertahun berdasarkan pemeringkatan (penghargaan).	155,000,000	112,870,000	98,500,000	43,340,000	90,71	101,900,000	126,100,000	102,62
1	15	18	06	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi promosi/temu Mitra dengan pihak ketiga (koperasi).	40,000,000	35,998,000	29,500,000	17,000,000	89,62	40,000,000	37,012,000	102,81

1	15	18	09	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah koperasi yang di monitoring dan dievaluasi pertahun (koperasi).	42,000,000	40,000,000	30,500,000	25,280,000	95,08	45,025,000	46,505,000	116.26
1	15	18	11	Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus Pengelola USP	Jumlah pengurus/pengelola KSP/USP yang dilatih (orang).	59,000,000	54,804,000	47,000,000	44,500,000	95,36	49,865,055	62,040,800	113,20
1	15	18	12	Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah koperasi sehat yang dinilai (koperasi)	48,000,000	37,250,000	30,250,000	22,250,000	75,46	48,000,000	31,773,333	61.07
1	15	18	13	Pembinaan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP	Jumlah fasilitasi koperasi sehat (koperasi).	147,000,000	143,800,000	98,000,000	22,800,000	94,59	92,000,000	172,246,666	119,78
1	15	18	17	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelolaan Pasar Tradisional	Jumlah pembinaan koperasi pasar Tradisional (kegiatan).	53,000,000	29,800,000	23,300,000	10,800,000	80,44	53,000,000	43,908,333	147,34
1	15	18	18	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah koperasi /KUD yang dilatih (koperasi).	77,000,000	74,466,000	55,297,300	50,197,300	85,63	93,937,000	80,842,666	108,56
1	15	08		Program Penunjang Pemerintahan umum.	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum setiap Tahun Anggaran	37,500,000	49,500,000	45,250,000	70,750,000	-	92,750,000	16,500,000	33,33
1	15	08	01	Penyusunan rencana perangkat daerah.	Jumlah dokumen Renstra,Renja, Renja perubahan,RKA,DPA,DPPATersedia tepat waktu (dokumen).	22,000,000	31,000,000	32,250,000	40,250,000	-	50,250,000	10,333,333	33,33
1	15	08	02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah.	Jumlah pemeliharaan website diskop yang dikelola (kegiatan).	15,500,000	18,500,000	13,000,000	30,500,000	-	42,500,000	6,166,666	33,33

Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas:

” Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha mikro “

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone terdapat susunan organisasi yang terdiri dari

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris dengan 2 sub bagian
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi dengan 3 seksi
- d. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dengan 3 seksi
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dengan 3 seksi

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone telah ditetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

TUGAS :

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

TUGAS

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

FUNGSI

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Pelaksanaan program dan anggaran.
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat.
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas.
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TUGAS

Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan.
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian.
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai.
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas.
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan.
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya.
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset.
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN TUGAS

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan.
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja.
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan.
- f. Membuat rencana kerja tahunan.
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen

keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas.
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan.
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan.
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala.
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan.
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan.
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

3. KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN TUGAS

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi

FUNGSI

- a. Penganalisaan dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam.
- b. Penganalisaan dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
- c. Penganalisaan berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.
- d. Penganalisaan berkas pembubaran koperasi.
- e. Perencanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam.
- f. Perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- g. Penganalisaan data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat.

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN

TUGAS

Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas :

- a. Menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam.
- b. Menganalisis dokumen izin pembubaran kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
- c. Menganalisis berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.
- d. Menganalisa berkas pembubaran koperasi.
- e. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit usaha simpan pinjam.
- f. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- g. Menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat.
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

KEPALA SEKSI KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN

TUGAS

Kepala Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas :

- a. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan.
- b. Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.
- c. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bidang Kelembagaan dan Pengawasn terkait tugasnya.

KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENILIAIAN

KESEHATAN

TUGAS

Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian mempunyai tugas :

- a. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yng sehat melalui penilaian kesehatan koperasi.
- b. Melaksanakan analisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- c. Menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- d. Memeriksa dan mengawasi kelembagaan dan usaha koperasi.

- e. Memeriksa dan mengawasi koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI TUGAS

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Koperasi.

FUNGSI

- a. Pengorganisasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi
- b. Pengorganisasian perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi.
- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- e. Pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.
- f. Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- g. Pelaksanaan perlindungan koperasi.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dinas terkait tugas dan fungsinya.

KEPALA SEKSI FASILITASI USAHA KOPERASI TUGAS

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- b. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya.
- c. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi ditingkat lokal dan nasional.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

TUGAS

Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi.
- b. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI

TUGAS

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- b. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

5. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

TUGAS

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

FUNGSI

- a. Pengordinasian pemberdayaan dan Perlindungan usaha mikro.
- b. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.
- c. Pengordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- d. Pengordinasian pendataan izin usaha mikro kecil menengah (IUMK)
- e. Pengordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
- f. Pengordinasian penengembangan kewirausahaan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikaan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

KEPALA SEKSI FASILITASI USAHA MIKRO

TUGAS

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di timgkat lokal dan nasional.
- b. Menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK)
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

TUGAS

- Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro.
- Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
- Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya.

TUGAS

- Merencanakan pengembangan kewirausahaan.
- Melaksanakan pengembangan kewirausahaan
- Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya.

Dinas Koperasi Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain memiliki personil dengan latar belakang pendidikan dan ketrampilan sebagaimana telah diuraikan diatas, namun sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan organisasi perlu ditingkatkan lagi mengingat gedung kantor belum memadai.

Sedangkan untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada perubahan kedua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 setelah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan diubah kembali menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan anggaran PD dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi Komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone, maka Analisa Capaian Kinerja yang dipakai untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian rencana kinerja dimaksud, digunakan instrument pengukuran ordinal dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran dan hasil.

Adapun Persentase skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

85-100 =	Sangat baik/Sangat berhasil
70-<85 =	Baik/Berhasil
55-<70 =	Kurang Baik/Kurang Berhasil
<55 =	Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil

Pencapaian kinerja pelayanan PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM kab. Bone
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Koperasi Aktif dan koperasi sehat	-	Koperasi Aktif	30,39 Persen	32,44 Persen	22,47 persen	72,65 Persen	-	58,96 Persen (283 / 480)	34,50 Persen	33,70 persen	
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	-	Usaha Mikro	99,91 Persen	99,86 Persen	71,65 Persen	33,70 Persen	-	87,8 Persen (9628 / 9933)	99,86 Persen	72,65 Persen	

Dari hasil kinerja pada tahun 2019 jika dimasukkan pada scoring tolok ukur capaian kinerja akan diperoleh sebagai berikut:

No.	Sasaran RPJMD	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang berkembang dan bertambahnya Jumlah wirausaha baru	Berhasil
2	Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat	Berhasil

Dari Tabel 2.4 dapat kita jelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan PD Bidang Koperasi dan UKM dapat mencapai realisasi 100% dari target kinerja ini berarti baik / berhasil. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang matang dan dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, yaitu :

- a. Aspek Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
 - ☐ Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar.
 - ☐ Masih banyaknya koperasi tidak aktif, seperti pengurus,pengawas tidak bekerja sebagaimana tupoksinya.
 - ☐ Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan dengan secara menyeluruh oleh Gerakan Koperasi.
 - ☐ Masih adanya Asosiasi yang belum dimanfaatkan oleh UKM.
 - ☐ sebagaimana mestinya.
 - ☐ Masih banyak Koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat ,Dan koperasi mengalami hambatan.
- b. Aspek Sumber Pembiayaan
 - o Pada umumnya Koperasi dan UKM masih belum memanfaatkan sepenuhnya pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non Bank.
 - o Pada umumnya koperasi sulit mendapatkan dana perkuatan dana lembaga keuangan.

- o Banyaknya Koperasi yang tidak aktif mempengaruhi penyaluran fasilitas
 - o Sanksi hukum tidak tegas dan tidak jelas terhadap Koperasi yang melakukan tindak pidana maupun Perdata.
- c. Akses Pasar (Promosi, sarana pemasaran produk dan terbatasnya pameran produk-produk koperasi)
- o Belum optimal Pemanfaatan IT sebagai salah satu sarana pemasaran dan pengembangan produk.
 - o Belum optimalnya penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro melalui pameran-pameran baik tingkat lokal maupun nasional, Promosi Kabupaten dengan Provinsi, promosi bazar Usaha Mikro.
 - o Mutu produk Koperasi dan Usaha Mikro belum memenuhi standar pasar. Produk unggulan lokal belum berdaya saing.
 - o Tidak tercapainya target produksi dalam pemasaran.
- d. Aspek SDM dan Pelaku UKM/Koperasi
- o Kurangnya minat wirausaha baru Koperasi dan Usaha Mikro
 - o Kurangnya pengetahuan anggota tentang tata cara berkoperasi yang benar.
 - o Kurangnya standar kompetensi gerakan Koperasi.
- e. Aspek Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro
- o Masih kurangnya aspek kemampuan SDM pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya.
 - o Kurang optimalnya penguasaan manajemen pengelolaan Ritel koperasi. Pengelolaan Manajemen KSP/USP masih belum optimal.
 - o Kurangnya pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen Koperasi dan UMKM.
- f. Aspek Penguasaan Teknologi, Desain produk, Sertifikasi produk dan lain - lain.
- o Masih kurangnya kemampuan SDM Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendiversifikasi produknya.
 - o Terbatasnya informasi tentang kemajuan teknologi yang bisa dikerjakan oleh koperasi.
- g. Pengelolaan Program Strategis (Koperasi wanita)
- Masih banyaknya SDM Pengelola (Pengurus dan Pengawas) Kopwan yang belum memahami tentang pengelolaan koperasi baik secara administrasi organisasi maupun administrasi keuangan, sehingga perlu diadakan bimtek serta pendampingan yang berkelanjutan.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi sebagai berikut :

1. Mengembangkan Koperasi sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri.
2. Meningkatkan daya saing kelembagaan dan usaha Koperasi dan Usaha Mikro terhadap persaingan ekonomi global
3. Peningkatan kualitas penyajian data dan Informasi dalam penyusunan kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro
4. Mengembangkan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil
5. Meningkatkan peran Koperasi dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Bupati Bone serta sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.

Tabel 2.5. (T-C.31.)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/s ub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Persentase rata-rata capaian kinerja indicator program teknis perangkat daerah	100%	3,009,840,420	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	Persentase rata-rata capaian kinerja indicator program teknis perangkat daerah		3,009,840,420	
1	Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran setiap tahun anggaran.		75.518.220	Perencanaan ,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran setiap tahun anggaran.		75.518.220	
-	Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah dokumen renstra,renja dan P-renja,RKA,DPA,DPPA tersedia tepat waktu	3 Dokumen	38,758,220	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah dokumen renstra,renja dan P-renja,RKA,DPA,DPPA tersedia tepat waktu	6 Dokumen	38,758,220	

-	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (dokumen)	5 Dokumen	36,760,000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (dokumen)	5 Dokumen	36,760,000	
-	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah dokumen RKA tersedia tepat waktu (dokumen)	1 Dokumen	0	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah dokumen RKA tersedia tepat waktu (dokumen)	1 Dokumen	0	
-	Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah dokumen DPA tersedia tepat waktu (dokumen)	1 Dokumen	0	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah dokumen DPA tersedia tepat waktu (dokumen)	1 Dokumen	0	
-	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen DPA tersedia tepat waktu (dokumen)	1 Dokumen	0	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen DPA tersedia tepat waktu (dokumen)	1 Dokumen	0	
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan keuangan setiap tahun anggaran		2,260,205,640	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan keuangan setiap tahun anggaran		2,260,205,640	
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Tingkat ketersediaan gaji tunjangan dan tambahan penghasilan PNSD satu tahun anggaran.	1 Tahun	2.260,205,640	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Tingkat ketersediaan gaji tunjangan dan tambahan penghasilan PNSD satu tahun anggaran.	1 Tahun	2.260,205,640	

3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua kecamatan, semua kelurahan kab.bone			48,955,000	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua kecamatan, semua kelurahan kab.bone			48,955,000	
-	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Semua kecamatan, semua kelurahan kab.bone	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan/diklat structural (orang)	5 orang	48,955,000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Semua kecamatan, semua kelurahan kab.bone	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan/diklat structural (orang)	5 orang	48,955,000	
-	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Semua kecamatan, semua kelurahan kab.bone	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek (orang)	5 orang	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Semua kecamatan, semua kelurahan kab.bone	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek (orang)	5 orang	0	
4	Administrasi umum perangkat daerah	Tanete riattang, manurunge, kab.bone	Cakupan ketersediaan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor berbasis IT setiap tahun anggaran		271,594,210	Administrasi umum perangkat daerah	Tanete riattang, manurunge, kab.bone	Cakupan ketersediaan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor berbasis IT setiap tahun anggaran		271,594,210	
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanete riattang, manurunge, kab.bone	Tingkat ketersediaan alat tulis kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran.	12 paket	40,366,360	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanete riattang, manurunge, kab.bone	Tingkat ketersediaan alat tulis kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran.	12 paket	40,366,360	
-	Penyediaan bahan logistik kantor	Tanete riattang, manurunge, kab.bone	Tingkat ketersediaan makam minum harian tamu sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	12 paket	22.074,200	Penyediaan bahan logistik kantor	Tanete riattang, manurunge, kab.bone	Tingkat ketersediaan makam minum harian tamu sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	12 paket	22.074,200	

-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Tingkat ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	24 paket	5.013,650	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Tingkat ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	24 paket	5.013,650	
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Junlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan	120 kali	2,400,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Junlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan	120 kali	2,400,000	
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Tingkat keikutsertaan aparat dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi	12 kegiatan	132,140,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Tingkat keikutsertaan aparat dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi	12 kegiatan	132,140,000	
-	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah kegiatan pengelolaan aplikasi dan website kantor	1 kegiatan	69,600,000	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah kegiatan pengelolaan aplikasi dan website kantor	1 kegiatan	69,600,000	
5	Pengadaan barang milik daerah penungjang urusan pemerintah daerah.	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		52,855,400	Pengadaan barang milik daerah penungjang urusan pemerintah daerah.	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		52,855,400	
-	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	3 unit	52,855,400	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	3 unit	52,855,400	
-	Pengadaan mebel	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	1 Paket	0	Pengadaan mebel	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	1 Paket	0	

6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi jasa penyediaan dan pelayanan kantor setiap tahun anggaran		243,830,800	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi jasa penyediaan dan pelayanan kantor setiap tahun anggaran		243,830,800	
-	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Tingkat ketersediaan jasa komunikasi (telepon,internet,air dan listrik)	48 rekening	46,000,000	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Tingkat ketersediaan jasa komunikasi (telepon,internet,air dan listrik)	48 rekening	46,000,000	
-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali)	324 kali	197,830,800	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali)	324 kali	197,830,800	
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi pemeliharaan sarana pra sarana kantor sesuai kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		56,881,150	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Cakupan realisasi pemeliharaan sarana pra sarana kantor sesuai kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		56,881,150	
-	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	11 paket	46,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	11 paket	46,000,000	
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah pemenuhan jasa dan komponen AC,computer dan printer	4 paket	6,510,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah pemenuhan jasa dan komponen AC,computer dan printer	4 paket	6,510,000	

-	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1 kegiatan	3.371,150	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1 kegiatan	3.371,150	
	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam		Persentase capaian penilaian koperasi berprestasi	80%	87,217,800	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam		Persentase capaian penilaian koperasi berprestasi	80%	87,217,800	
1	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembukaan kantor cabang-cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi		87,217,800	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembukaan kantor cabang-cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi		87,217,800	
-	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah koperasi di fasilitasi penyuluhan/sosialisasi jumlah koperasi yang difasilitasi rekomendasi izin usaha dan legalisasi izin lembaga	50 orang/koperasi 10 koperasi	87,217,800	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Tanete riattang,manurunge,kab.bone	Jumlah koperasi di fasilitasi penyuluhan/sosialisasi jumlah koperasi yang difasilitasi rekomendasi izin usaha dan legalisasi izin lembaga	50 orang/koperasi 10 koperasi	87,217,800	

						kabupaten/kota					
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase capaian capaian kualitas kelembagaan koperasi	80%	0	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase capaian capaian kualitas kelembagaan koperasi	80%	0	
1	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah/kab.kota			Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah/kab.kota			
-	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota		Jumlah koperasi berprestasi yang difasilitasi pertahun berdasarkan pemeringkatan (penghargaan)	10 penghargaan	0	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota		Jumlah koperasi berprestasi yang difasilitasi pertahun berdasarkan pemeringkatan (penghargaan)	10 penghargaan	0	
-	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan		Jumlah koperasi yang di monitoring dan evaluasi pertahun (koperasi)	35 koperasi	0	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-		Jumlah koperasi yang di monitoring dan evaluasi pertahun (koperasi)	35 koperasi	0	

	kabupaten/kota					undangan kewenangan kabupaten/k ota					
	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi		Persentase capaian penilaian dan penghargaan koperasi sehat	80%	40,446,000	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi		Persentase capaian penilaian dan penghargaan koperasi sehat	80%	40,446,000	
1	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Semua kecamatan,semu a kelurahan kab.bone	Cakupan realisasi penilaian dan penghargaan KSP/USP	10 koperasi	40,446,000	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/k ota	Tanete riattang,manu runge,kab.bon e	Cakupan realisasi penilaian dan penghargaan KSP/USP		40,446,000	
-	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Semua kecamatan,semu a kelurahan kab.bone	Jumlah koperasi yang dinilai	25 koperasi	40,446,000	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/k ota	Semua kecamatan,se mu kelurahan kab.bone	Jumlah koperasi yang dinilai	25 koperasi	40,446,000	
	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi		Persentase capaian produktifitas usaha koperasi	80%	0	Program pemberdaya an dan perlindunga n koperasi		Persentase capaian produktifitas usaha koperasi	80%	0	
1	Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan			Kegiatan pemberdaya an dan perlindunga n koperasi yang keanggotaan ya dalam daerah kabupaten/k ota		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan			

-	Pemberdayaan peningkatan produktivitas ,nilai tambah,akses pasar,akses pembiayaan,penataan manajemen,standarisasi,dan rekruturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Semua kecamatan,semua kelurahan kab.bone	Jumlah kopeasi yang di fasilitasi promosi /temu mitra dengan pihak ketiga	5 koperasi	0	Pemberdayaan peningkatan produktivitas ,nilai tambah,akses pasar,akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan rekruturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Semua kecamatan,semua kelurahan kab.bone	Jumlah kopeasi yang di fasilitasi promosi /temu mitra dengan pihak ketiga	5 koperasi	0	
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian		Persentase capaian kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	80%	101,921,380	Program pendidikan dan latihan perkoperasian		Persentase capaian kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	80%	101921,380	
1	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koerasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan,semua kelurahan	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan			Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koerasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Semua kabupaten/kota,semua kecamatan,semua kelurahan	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan			

-	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pengurus/pengelola koperasi/KUD yang dilatih jumlah pengurus/pengelola KSP/USP yang dilatih manajemen akuntansi koperasi	25 koperasi 25 orang	101,921,380	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pengurus/pengelola koperasi/KUD yang dilatih jumlah pengurus/pengelola KSP/USP yang dilatih manajemen akuntansi koperasi	25 koperasi 25 orang	101,921,380	
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)		Persentase peningkatan produktifitas usaha mikro kecil menengah	80%	120,780,000	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)		Persentase peningkatan produktifitas usaha mikro kecil menengah	80%	120,780,000	
1	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan			120,780,000	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Renja perubahan, RKA, DPA, DPPA tersedia tepat waktu (dokumen)		120,780,000	
-	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi promosi/temu mitra dengan pihak ketiga (UKM)	20 UKM	120,780,000	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi promosi/temu mitra dengan pihak ketiga (UKM)	20 UKM	120,780,000	

1	-	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Data potensi an pengembangan usaha mikro jumlah usaha mikro pertahun	1 Dokumen 1800 UM	0	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Semua kabupaten/ko ta, semua kecamatan, semua kelurahan	Data potensi an pengembangan usaha mikro jumlah usaha mikro pertahun	1 Dokumen 1800 UM	0	
	-	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha jumlah WUB yang dibina	10 usah kecil 120 WUB	0	Pemberdaya an kelembagaa n potensi dan pengembang an usaha mikro	Semua kabupaten/ko ta, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha jumlah WUB yang dibina	10 usah kecil 120 WUB	0	
	-	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah keluarga miskin usaha produktif yang difasilitasi	20 orang	0	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdaya an usaha mikro	Semua kabupaten/ko ta, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah keluarga miskin usaha produktif yang difasilitasi	20 orang	0	
		Program Pengembangan UMKM		Persentase peningkatan kualitas pelaku usaha mikro, kecil menengah	80%	0	Program Pengemban gan UMKM		Persentase peningkatan kualitas pelaku usaha mikro, kecil menengah	80%	0	
	-	Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usah menjadi usaha kecil				0						
	-	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Bantuan alat usaha jumlah usaha mikro yang dilatih jumlah usaha mikro yang difasilitasi bantuan alat usaha	60 usaha mikro 10 kelompok							

	dan teknologi									
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan koperasi, pelaku Usaha Mikro, masyarakat serta Organisasi lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan usulan dan saran program atau kegiatan dari para stakeholders.

Proses penyusunan anggaran dan penganggaran kinerja dimulai dari Sub. Bagian Program dan Keuangan yang kemudian dikonsolidasikan kepada setiap bidang yang ada di Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bone melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disetujui oleh Kepala Dinas. RKA kemudian dikirim ke pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan diteliti oleh Tim Anggaran Eksekutif untuk dinilai kelakanya (berdasarkan) Urgensi dan (ketersediaan dana) di akomodasikan dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD tahun 2019-2023 dan tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone. Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan penjabaran dari susunan dan program yang dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh Staf, namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM kab. Bone

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan,penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku	Kec. bengo,Kec.ulaweng.Kec tellulimpoe,Kec ajangale ,Kec.Dua Boccoe,Kec.Tellu Siattinge,Kec.amali,Kec.cenrana, Kec.bontocani Kec. libureng,	Terlaksana Pelatihan empat Belas Kali di empat Belas Kecamatan	120.000.000	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah amanat UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025, UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, dan UU No.20/2008 tentang UMKM. RPJPN Menekankan bahwa kebijakan pemberdayaan koperasi dan UKM diarahkan untuk mendukung misi peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Nasional		
1	Peningkatan Kualitas sumber daya manusia	Renstra 2018 -2023	
2	Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema Pembiayaan	Renstra 2018 -2023	
3	Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran	Renstra 2018 -2023	
4	Penguatan kelembagaan usaha	Renstra 2018 -2023	
5	Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha	Renstra 2018 -2023	
B.	Provinsi		
1.	Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM	Renstra 2018 -2023	
2	Peningkatan akses kepada sumber daya produktif	Renstra 2018 -2023	
3	Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	Renstra 2018 -2023	
4	Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM	Renstra 2018 -2023	
5	Penguatan kelembagaan Koperasi	Renstra 2018 -2023	

Kebijakan dalam RPJMD yang ingin diterapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone sesuai Visi dan Misi Rencana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN DALAM RPJMD
KABUPATEN BONE

NO.	KEBIJAKAN	SUMBER KET
1.	Meningkatnya persentase koperasi aktif	RPJMD
2.	Meningkatkan pertumbuhan volume usaha mikro	RPJMD
3.	Meningkatkan persentase usaha mikro dan kecil	RPJMD
4	Meningkatkan persentase serapan anggaran perangkat daerah	RPJMD
5.	Meningkatkan persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	RPJMD
6.	Meningkatnya persentase pegawai memperoleh nilai SKP baik	RPJMD
7.	Meningkatnya persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan tersedia tepat waktu.	RPJMD
8.	Meningkatnya persentase dokumen perencanaan data data umum koperasi	RPJMD

Tujuan dan sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kabupaten Bone mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Bone secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten BoneTahun 2018-2023, yaitu:

“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan target – target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu pencapaian target – target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro “
2. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Serta tiga Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM adalah :

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas.
2. Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro.
3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan/sub kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan/sub kegiatan	Sumber data	Penanggung jawab
	Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan persentase pertumbuhan koperasi berprestasi	Persentase fasilitasi penertiban izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase capaian penilaian koperasi berprestasi	1.fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas operasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota -fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Data keragaan Koperasi (ODS)	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
				Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Persentase capaian penilaian dan penghargaan koperasi sehat	1.pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota -peningkatan dan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi		
	Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya persentase pertumbuhan usaha menengah	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Program pemberdayaan usaha menengah,usah kecil,dan usah mikro (UMKM)	1. Persentase Peningkatan kualitas usaha mikro ,kecil menengah	1pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan, kemudahan perizinan,penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku -pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Data Pemberdayaan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
			2. Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha					

Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Dengan melihat Lampiran Tabel 4.1 (T.C.33) dapat disimpulkan bahwa rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone Tahun 2022 telah disesuaikan dengan anggaran program dan kegiatan sebagai berikut

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - penyediaan bahan logistic kantor
 - penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Dokumen pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
 5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
 - Pengadaan peralatan mesin lainnya
 6. Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - pemeliharaan/rahbilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
 1. Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
 - Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
3. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
 1. Kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

-Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota

4. Program pendidikan dan latihan perkoperasian

1. Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota
 - peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi

5. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

1. Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku
 - Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; tolok ukur dan hasil program ini adalah capaian tujuan dan sasaran dinas kopersi dan UMKM.
2. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam; tolok ukur dan hasil program ini adalah persentase capaian penilaian koperasi berprestasi.
3. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi; tolok ukur dan hasil program adalah persentase capaian penilaian dan penghargaan koperasi sehat
4. Program pendidikan dan latihan perkoperasian; tolok ukur dan hasil program ini adalah persentase capaian kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.
5. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); tolok ukur dan hasil program ini adalah persentase peningkatan produktifitas usaha mikro kecil menengah.

Tabel 4.1 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah :Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	17	01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah		100%	3,009,840,420	APBD / DAU			3,009,840,420
2	17	01	2.01	Perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan realisasi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran setiap tahun anggaran	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	75.518.220	APBD / DAU			75.518.220
2	17	01	2.01	01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renstra,renja dan P-renja,RKA,DPA,DPPA tersedia tepat waktu	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	38,758,220	APBD / DAU		3 dokumen	38,758,220

2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (dokumen)	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	36,760,000	APBD / DAU		5 Dokumen	36,760,000
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA tersedia tepat waktu (dokumen)	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	0	APBD / DAU		1 Dokumen	2,260,205,640
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA tersedia tepat waktu (dokumen)	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	0	APBD / DAU		1 Dokumen	2,260,205,640
2	17	01	2.1	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA tersedia tepat waktu (dokumen)	Semua kecamatan,sem ua kelurahan kab.bone	100%	0	APBD / DAU		1 Dokumen	
2	17	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan keuangan setiap tahun anggaran	Semua kecamatan,sem ua kelurahan kab.bone	100%	2,260,205,640	APBD / DAU			2,360,205,640
2	17	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tingkat ketersediaan gaji tunjangan dan tambahan penghasilan PNSD satu tahun anggaran.	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	2,260,205,640	APBD / DAU		1 tahun	2,360,205,640
2	17	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tingkat ketersediaan alat tulis kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran.	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	48,955,000	APBD / DAU			49,955,000
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan/diklat structural (orang)	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	48,955,000	APBD / DAU		5 Orang	49,955,000

2	17	01	2.05	11	Bimbingan teknis implemenasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek (orang)	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	0	APBD / DAU		5 Orang	0
2	17	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan aparatur Pembina yang bersertifikat	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	271,594,210	APBD / DAU			271,594,210
2	17	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tingkat ketersediaan alat tulis kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran.	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	40,366,360	APBD / DAU		12 paket	40,366,360
2	17	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tingkat ketersediaan makam minum harian tamu sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	22.074,200	APBD / DAU		12 paket	22.074,200
2	17	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tingkat ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	5.013,650	APBD / DAU		24 paket	5.013,650
2	17	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	2,400,000	APBD / DAU		120 kali	2,400,000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tingkat keikutsertaan aparat dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	132,140,000	APBD / DAU		12 kegiatan	132,140,000
2	17	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah kegiatan pengelolaan aplikasi dan website kantor	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	69,600,000	APBD / DAU		1 kegiatan	69,600,000

2	17	01	2.09	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan realisasi jasa penyediaan dan pelayanan kantor setiap tahun anggaran	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	243,830,800	APBD / DAU			243,830,800
2	17	01	2.09	02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tingkat ketersediaan jasa komunikasi (telepon,internet,air dan listrik)	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	46,000,000	APBD / DAU		48 rekening	243,830,800
2	17	01	2.09	04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali)	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	197,830,800	APBD / DAU		324 kali	243,830,800
2	17	01	2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan realisasi pemeliharaan sarana pra sarana kantor sesuai kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	56,881,150	APBD / DAU			56,881,150
2	17	01	2.09	01 Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	46,000,000	APBD / DAU		11 paket	46,000,000
2	17	01	2.09	06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemenuhan jasa dan komponen AC,computer dan printer	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	6,510,000	APBD / DAU		4 paket	6,510,000
2	17	01	2.09	09 Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	100%	3.371,150	APBD / DAU		1 kegiatan	3.371,150

1	17	02			Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase capaian penilaian koperasi berprestasi		80%	87,217,800	APBD / DAU			87,217,800
1	17	02	2.01	01	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi di fasilitasi penyuluhan/sosialisasi jumlah koperasi yang difasilitasi rekomendasi izin usaha dan legalisasi izin lembaga	Tanete riattang,manur unge,kab.bone	80%	87,217,800	APBD / DAU		50 orang/koperasi 10 koperasi	87,217,800
2	17	04			Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Persentase capaian penilaian dan penghargaan koperasi sehat		80%	40,446,000	APBD / DAU			40,446,000
2	17	04	2.01		Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Cakupan realisasi penilaian dan penghargaan KSP/USP	Semua kecamatan,sem ua kelurahan kab.bone	80%		APBD / DAU			
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang dinilai	Semua kecamatan,sem ua kelurahan kab.bone	80%	40,446,000	APBD / DAU		25 koperasi	40,446,000
2	17	05			Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase capaian kapasitas dan kompetensi SDM koperasi		80%	101,921,380	APBD / DAU			101,921,380

2	17	05	2.01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah pengurus/pengelola koperasi/KUD yang dilatih jumlah pengurus/pengelola KSP/USP yang dilatih manajemen akuntansi koperasi	Semua kabupaten/kot a, semua kecamatan, semua kelurahan	80%	101,921,380	APBD / DAU		25 koperasi 25 orang	101,921,380
1	17	07			Program pemberdayaan usaha menengah ,usaha kecil,dan usaha mikro (UMKM)	Persentase peningkatan produktifitas usaha mikro kecil menengah		80%	120,780,000	APBD / DAU			120,780,000
1	17	07	2.01		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan,penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku		Semua kabupaten/kot a, semua kecamatan, semua kelurahan		120,780,000	APBD / DAU			120,780,000
1	17	07	2.01	01	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi promosi/temumitra dengan pihak ketiga (UKM)	Semua kabupaten/kot a, semua kecamatan, semua kelurahan		120,780,000	APBD / DAU		20 UKM	120,780,000
1	17	07	2.01	02	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Data potensi an pengembangan usaha mikro jumlah usaha mikro pertahun	Semua kabupaten/kot a, semua kecamatan, semua kelurahan		0	APBD / DAU		1 Dokumen 1800 UM	0
1	17	07	2.01	04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha jumlah WUB yang dibina	Semua kabupaten/kot a, semua kecamatan, semua kelurahan		0	APBD / DAU		10 usah kecil 120 WUB	0
1	17	07	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah keluarga miskin usaha produktif yang difasilitasi	Semua kabupaten/kot a, semua kecamatan, semua kelurahan		0	APBD / DAU		20 orang	0

2	17	08		Program pengembangan UMKM	Persentase peningkatan kualitas pelaku usaha mikro, kecil menengah		80%		APBD / DAU			
2	17		2.01	Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usah menjadi usaha kecil				0	APBD / DAU			
2	17	08	2.01	01 Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Bantuan alat usaha jumlah usaha mikro yang dilatih jumlah usaha mikro yang difasilitasi bantuan alat usaha			0	APBD / DAU		60 usaha mikro 10 kelompok	
2	17	06		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase capaian produktifitas usaha koperasi		80%	0	APBD / DAU			0
2	17	06	2.01	Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan				APBD / DAU			
2	17	06	2.01	01 Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan rekruturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kopeasi yang di fasilitasi promosi /temu mitra dengan pihak ketiga			0	APBD / DAU		5 koperasi	
2	17	03		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase capaian kualitas kelembagaan koperasi		80%	0	APBD / DAU			
2	17	03	2.01	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah/kab.kota				APBD / DAU			

				daerah kabupaten/kota								
2	17	03	2.01	01 Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi berprestasi yang difasilitasi pertahun berdasarkan pemeringkatan (penghargaan)			0	APBD / DAU		10 penghargaan	
				02 Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang dimonitoring dan evaluasi pertahun (koperasi)			0	APBD / DAU		35 koperasi	
								3.360.205,600				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone tahun 2022 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun kedepan yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bone. Gambaran program/kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Program/kegiatan yang direncanakan selama satu tahun kedepan merupakan turunan dari program-program yang ada didalamnya.

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna sesuai apa yang diharapkan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan masukan dari segenap pihak yang berkompeten dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja ini.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022																			
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi																			
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									3,360,205,600				0	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									3,009,840,420				0	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									75,518,220				0	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan P-Renja tersedia tepat waktu (Dokumen)		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	3 Dokumen		38,758,220			Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0	
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Jumla Dokumen RKA tersedia tepat waktu (Dokumen)		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0	
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Jumla Dokumen DPA tersedia tepat waktu (Dokumen)		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0	
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Jumla Dokumen DPA tersedia tepat waktu (Dokumen)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan(Dokumen)		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	5 Dokumen		36,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2,260,205,640				0	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Tingkat ketersediaan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNSD satu tahun anggaran		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	1 Tahun		2,260,205,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									48,955,000				0	
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Jumlah Aparat yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/Diklat Struktural (orang)		Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	5 Orang		48,955,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0	
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Jumlah Aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek (orang)		Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	5 Orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									271,594,210				0	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Tingkat ketersediaan alat tulis kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	12 Paket		40,366,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Tingkat ketersediaan Makan-Minum harian, tamu sesuai rencana kebutuhan satu		Kab. Bone, Tanete Riattang,	BB Predikat	12 Paket		22,074,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022																		
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Tingkat ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	24 Paket		5,013,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	120 kali		2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Tingkat keikutsertaan aparat dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi		Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	12 Kegiatan		132,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0
2	17	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aplikasi dan Website Kantor		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	1 Kegiatan		69,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								52,855,400				0	
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Jumlah pengadaan Mebeleur sesuai rencana kebutuhan satu tahun Anggaran		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	1 Paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun Anggaran		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	3 unit		52,855,400			Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								243,830,800				0	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Tingkat ketersediaan jasa komunikasi (telepon ,internet,air dan listrik)		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	48 Rekening		46,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun(kali)		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	324 kali		197,830,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56,881,150				0	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	umlah pemeliharaan kendaraan Dinas		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	11 Paket		46,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Jumlah pemenuhan jasa dan komponen Ac,komputer dan printer		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	4 Paket		6,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	BB Predikat	1 Kegiatan		4,371,150			Nilai Evaluasi Sakip Oleh Apip	A Predikat	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM							87,217,800				0		
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							87,217,800				0		
					Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi di fasilitasi Penyuluhan/sosialisasi Jumlah Koperasi yang di fasilitasi rekomendasi izin Usaha dan legalisasi izin lembaga		Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	38,60 %	50 Orang/Koperasi 10 Koperasi		87,217,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Koperasi Aktif	40,70 %	0
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							0				0		
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							0				0		
					Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Berprestasi	umlah Koperasi berprestasi yang di fasilitasi pertahun berdasarkan pemeringkatan (penghargaan)			3 Unit	10 Penghargaan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah koperasi Berprestasi	3 Unit	0
					Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang di Monitoring dan Evaluasi pertahun (Koperasi)			3 Unit	35 Koperasi		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah koperasi Berprestasi	3 Unit	0
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							40,446,000				0		
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							40,446,000				0		
					Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi sehat	Jumlah Koperasi yang di nilai		Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	25 Koperasi		40,446,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koperasi sehat	70 %	0
					Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi sehat	Jumlah Koperasi sehat yang di pantau dan di Fasilitasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	10 Koperasi		0			Persentase Koperasi sehat	70 %	0
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							101,921,380				0		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							101,921,380				0		
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pertumbuhan volume usaha Koperasi	Jumlah Pengurus /Pengelola koperasi/KUD yang dilatih Jumlah Pengurus/Pengelola KSP/USP yang di latih Manajemen Akuntansi Koperasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,223 M	25 Koperasi 25 Orang		101,921,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan volume usaha Koperasi	260,566 M	0
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							0				0		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							0				0		
					Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertumbuhan volume usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang di fasilitasi Promosi / Temu Mitra dengan Pihak ke tiga		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,223 M	5 Koperasi		0			Pertumbuhan volume usaha Koperasi	260,566 M	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022																		
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							120,780,000				0		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							120,780,000				0		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil; Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Data potensi dan pengembangan usaha mikro Jumlah Usaha Mikro pertahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,61; 99,86 %	1 Dokumen 1800 UM		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil; Persentase Usaha Mikro dan Kecil	13,28; 99,86 %	0
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil; Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi promosi/temu mitra dengan pihak ketiga (UKM)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,61; 99,86 %	20 UKM		120,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil; Persentase Usaha Mikro dan Kecil	13,28; 99,86 %	0
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil; Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha kecil yang di berikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha Jumlah WUB yang di bina		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,61; 99,86 %	10 Usaha Kecil 120 WUB		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil; Persentase Usaha Mikro dan Kecil	13,28; 99,86 %	0
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil; Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah keluarga miskin usaha produktif yang di fasilitasi		Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,61; 99,86 %	20 Orang		0			Persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil; Persentase Usaha Mikro dan Kecil	13,28; 99,86 %	0
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							0				0		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							0				0		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil, dan Menengah	asi bantuan alat Usaha Jumlah usaha mikro yang di latih Jumlah Usaha Mikro Yang di fasilitasi bantuan alat Usaha		Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	60 Usaha Mikro 10 kelompok		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil, dan Menengah	80 Persen	0
TOTAL												3,360,205,600				0		